

Pendekatan Pembelajaran Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi

Mochamad Enoh

Abstract: In the structure of the competence based curriculum for junior secondary school (SMP/MTs), Social Science is offered to grade VII, VIII, and IX. It consists of Economics, Geography, and History. This indicates that an interdisciplinary approach needs to be implemented. The old paradigm has to be replaced by the new one. In the 1994 curriculum social science was taught by a team of teacher, while in the competence-based curriculum it should be taught by a real team-teaching. The old approach is incompatible with the social science concept. In order to make the competence-based curriculum run well, especially in the social science course, it is necessary to organize trainings for the social science teachers.

Kata kunci: pendekatan pembelajaran, ilmu pengetahuan sosial, kurikulum berbasis kompetensi.

Tantangan pendidikan dalam era kesejagadan adalah bagaimana mempersiapkan lulusannya agar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Berkaitan dengan hal itu, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melalui Pusat Kurikulum memprogramkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal itu terkait dengan Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2002.

Mochamad Enoh adalah dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Kompetensi merupakan refleksi dari pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. McAshan (dalam Mulyana, 2002: 38) mengemukakan bahwa kompetensi adalah "... is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent that he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotoric behaviors". Dalam hal ini kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dilakukan seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan baik.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pusat Kurikulum (Puskur) (2002: 1) dasar pemikiran menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum adalah: (1) kompetensi berkenaan dengan perangkat kemampuan melakukan sesuatu sehingga kompetensi harus mempunyai konteks; (2) konteks yang dimaksud dapat terdiri dari berbagai bidang kehidupan atau hal-hal lainnya yang diperlukan agar seseorang dapat melakukan sesuatu; (3) kompetensi mendeskripsikan proses belajar yang dilalui oleh sasaran didik untuk menjadi kompeten; (4) kompetensi adalah hasil (*outcomes*) yang mendeskripsikan apa yang dapat diperbuat oleh seseorang setelah melalui pendalaman perangkat kompetensi; (5) kehandalan kemampuan seseorang/anak didik melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui *performance* yang dapat diukur; dan (6) kompetensi menjadi ukuran dari apa yang dapat diperbuat seseorang.

Kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri: (1) menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun kelompok; (2) berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman; (3) penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode bervariasi; (4) sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif; dan (5) penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Dalam KBK, terdapat hubungan antara tugas-tugas yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia kerja. Karenanya, kurikulum harus bisa memenuhi tuntutan dunia kerja, khususnya dalam mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi yang perlu diajarkan kepada peserta didik di sekolah. Kompetensi yang dikuasai peserta didik harus dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar yang mengacu kepada pengalaman langsung.

Berdasarkan pengertian kompetensi di atas, KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performansi tertentu yang hasilnya bisa dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap kemampuan melakukan (kompetensi) tertentu. KBK memfokuskan pada pemerolehan kompetensi yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.

TUJUAN PENGETAHUAN SOSIAL

Di dalam kehidupan modern dewasa ini, dengan komunikasi yang serba lancar dan cepat, hubungan antarmanusia menjadi semakin intensif dan kompleks. Para pendidik di Indonesia menyadari perlunya pengetahuan tentang saling hubungan antarmanusia, manusia dengan benda-benda keperluan hidup, hubungan dengan lembaga, dan hubungan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka sudah melaksanakan program ini di sekolah melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan perwujudan dari satu pendekatan interdisiplin (*interdisciplinary approach*). IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi. Wesley (dalam Muljono, 1980: 3) mengemukakan bahwa IPS merupakan "... those portions or aspects of the social sciences that have been selected and adapted for use in the school or other instructional situations". Jadi IPS dipolakan untuk tujuan-tujuan instruksional dengan materi sesederhana mungkin, menarik, mudah dimengerti dan mudah dipelajari.

Tujuan IPS menurut Fenton (dalam Talud, 1980) terdiri dari 5 kelompok yaitu: (1) pemberian pengetahuan (*acquiring of knowledge*), yakni menjadikan anak didik menjadi warga negara yang baik sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari IPS; (2) pengembangan daya nalar dan penilaian kritis (*development of reasoning power and critical judgment*), yakni anak didik harus dilatih untuk memiliki kemampuan berpikir, dan kemampuan berpikir kritis; (3) melatih belajar mandiri (*training in independent study*), yakni anak didik harus dilatih untuk belajar sendiri, harus diajarkan bagaimana cara belajar yang baik, memupuk habitat belajar, dan mempergunakan waktu secara baik dan tepat guna; (4) pembentukan kebiasaan dan keterampilan (*formation of habits and skills*), yakni pembentukan

kegemaran dan keterampilan anak didik; dan (5) melatih bentuk-bentuk perilaku yang positif (*training in desirable patterns of conduct*), yakni melatih anak didik untuk menghayati nilai-nilai hidup yang baik, termasuk di dalamnya etika, moral, dan kejujuran. Untuk dapat melaksanakan program-program IPS dengan baik sudah sewajarnya guru harus mengetahui benar-benar tujuan pengajaran tersebut. Di samping itu, guru harus menguasai pengorganisasian bahan pelajaran, dan metode yang dipakai dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar.

Pengertian IPS yang dikembangkan di dalam kurikulum 1994 nampaknya tidak konsisten dengan definisi yang dikemukakan oleh Wesley dan Jarolimek (dalam Talud, 1980: 1), karena pengertian IPS dalam kurikulum tersebut ternyata lebih dipersempit. Jarolimek dan Wesley (dalam Talud, 1980) membedakan IPS dengan ilmu sosial sebagai "... those portions of the social sciences that have been selected... for instructional purposes". Binning (dalam Talud, 1980) menegaskan bahwa mata pelajaran IPS itu berhubungan langsung dengan perkembangan dan organisasi masyarakat manusia dan manusia sebagai anggota kelompok sosial.

Dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama di Indonesia hanya dipilih tiga aspek ilmu sosial saja yaitu geografi, sejarah, dan ekonomi. Di sekolah dasar, pembelajaran IPS sudah terpadu, dan diberikan oleh seorang guru kelas. Namun masih banyak guru SD yang mengeluh karena kurang menguasai konsep-konsep yang berhubungan dengan geografi. Walaupun demikian, sistem evaluasinya sudah terpadu, karena tidak diberikan secara terpisah. Lain halnya dengan di Sekolah Lanjutan Pertama, IPS diajarkan oleh guru bidang studi masing-masing. Nilai dari masing-masing bidang studi (sejarah, geografi, dan ekonomi) digabungkan dan dirata-rata. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip IPS seperti yang dikemukakan oleh Jarolimek. Seharusnya bahan IPS bersumber pada konsep-konsep dasar berbagai ilmu-ilmu sosial seperti ekologi, politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, dan geografi.

PENDEKATAN PEMBELAJARAN PENGETAHUAN SOSIAL DALAM KBK

Sedikitnya terdapat empat perbedaan mendasar antara kurikulum 1994 dengan KBK, yaitu perbedaan dalam hal kewenangan pengembangan, pendekatan pembelajaran, penataan muatan (*content*) termasuk struktur program dan model sosialisasi. Pada kurikulum 1994, kewenangan pengembangan kurikulum nasional seluruhnya berada di tangan pemerintah pusat (Puskur) dan daerah hanya berwenang pada pengembangan kurikulum lokal (dikenal

dengan muatan lokal). Kurikulum nasional memiliki porsi sekitar 80% dan kurikulum lokal sekitar 20%. Pada KBK, pemerintah pusat hanya mengembangkan kompetensi sebagai standar, sedangkan elaborasi kompetensi ini dalam wujud silabus diserahkan pada daerah/sekolah.

Pada kurikulum 1994, sebagian besar pendekatan pembelajaran dan pendekatan pengembangan kurikulum berbasis muatan, sedangkan pada KBK pendekatan pembelajarannya berbasis kompetensi. Pada KBK, muatan hanya dipandang sebagai wahana untuk mencapai kompetensi.

Terjadi penataan materi, jam belajar, dan struktur program pada KBK dibandingkan dengan kurikulum 1994. Misalnya, pada KBK terdapat integrasi muatan pendidikan budi pekerti ke beberapa mata pelajaran. Jumlah jam pelajaran perminggu dikurangi. Di SD, jam pelajaran untuk siswa kelas 1 dan 2 tidak dikurangi.

Implementasi kurikulum 1994 tidak diawali dengan kegiatan uji coba. KBK didahului dengan kegiatan uji coba yang dikenal dengan *piloting*. Kurikulum 1994 ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, dengan langsung diterapkan secara nasional. KBK, meski belum ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, sudah dilaksanakan di beberapa sekolah melalui kegiatan *piloting* bertahap.

Dari 4 perbedaan itu, perbedaan yang paling utama terletak pada pendekatan pembelajaran. Pada kurikulum 1994 yang berbasis muatan, diketahui bahwa siswa belum mencapai kemampuan optimalnya. Siswa hanya tahu banyak fakta tetapi kurang mampu memanfaatkannya secara efektif. KBK mengacu pada suatu standar minimal yang berorientasi pada *learning outcomes* yang longgar sehingga guru memiliki banyak celah untuk meningkatkan kualitas masukan (*input*) dan proses. Dengan demikian, perolehan hasil belajar sebagai pencapaian kompetensi dapat diraih melalui proses edukatif yang selalu mempertimbangkan karakteristik minat, bakat, kemampuan dan kebutuhan siswa (Karhami, 2002: 3).

KBK menggunakan istilah Pengetahuan Sosial (PS) untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Alokasi waktu PS untuk SMP dan MTs adalah 5 jam untuk Kelas VII, VIII, dan IX. Alokasi waktu 5 jam perminggu itu mencakup materi geografi, ekonomi, dan sejarah. Pembagian alokasi waktu untuk masing-masing materi diserahkan kepada kebijakan daerah atau sekolah. Hal ini bisa dimaklumi karena KBK hanya berfungsi sebagai *national platform* saja yang memungkinkan daerah mengembangkannya sendiri sesuai dengan potensi masing-masing.

Alokasi waktu 5 jam perminggu untuk PS tersebut menimbulkan dua pertanyaan pokok, yakni bagaimana pelaksanaan pendekatan pembelajaran PS dalam KBK, dan apakah guru-guru sudah dipersiapkan untuk itu?

Pengalaman dalam pelaksanaan kurikulum 1994 menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran IPS untuk SMP, yang terdiri dari materi geografi, ekonomi, dan sejarah ternyata masih terpisah-pisah. Menurut hemat penulis, pendekatan pembelajarannya seharusnya adalah *team teaching*. Jika di dalam KBK guru-guru tidak dipersiapkan atau diberi pelatihan dengan pendekatan pembelajaran terpadu, maka KBK bisa tidak berbeda dengan kurikulum 1994. Artinya PS itu hanya kumpulan nilai dari geografi, ekonomi, dan sejarah yang digabungkan dan dirata-rata. Kita tidak ingin pembaharuan ini hanya berupa slogan, tetapi pelaksanaan di lapangan masih saja bersifat tradisional. Hal ini merupakan suatu hal yang sia-sia.

Dalam pelaksanaan KBK guru PS perlu mendapat pelatihan sehingga mereka mampu mendalami tiga pendekatan yaitu pendekatan disiplin, pendekatan antarstruktur, dan pendekatan multidisiplin. Pengembangan IPS pada kurikulum 1994 disebabkan oleh: (1) penyusunan suatu satuan pelajaran dengan pendekatan terpadu sangat sulit, karena tidak adanya pedoman yang tegas untuk memilih pokok bahasan kunci dan pokok bahasan pendukung; (2) pandangan tiap-tiap guru tentang suatu konsep, kedalaman, dan keluasannya sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya; dan (3) keterampilan guru untuk mempertautkan konsep-konsep sangat terbatas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain waktu, kesempatan, dan referensi.

Untuk menghindari masalah tersebut, PS dalam pelaksanaan KBK harus secara konsisten menggunakan pendekatan interdisiplin, yang merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial. Menurut Mulyono (1980: 13), di dalam pembelajaran IPS siswa mempelajari konsep dan generalisasi itu memang penting agar siswa mudah memahami proses-proses yang terjadi di dalam masyarakat. Konsep dan generalisasi tidak mudah dilupakan, karena diperoleh melalui pemahaman dan bukan melalui hafalan. Konsep dan generalisasi yang dipahami membuat suatu peristiwa menjadi lebih jelas kaitannya satu dengan lainnya. Sifat menyeluruh penting untuk diketahui dan dipahami, karena IPS menangani bahan pelajaran dalam hubungan kait-berkait.

Pembelajaran konsep saja belum mencukupi dalam PS. PS perlu diajarkan dengan prinsip-prinsip *contextual teaching and learning (CTL)*, sekaligus berorientasi kepada *life skill*. Pembelajaran PS dituntut memiliki prinsip-prinsip CTL, yaitu *constructivism, inquiry, questioning, learning community, modeling, reflection, dan authentic assessment* (Depdiknas, 2002: 10).

PS berorientasi kepada *life skill* karena di dalam pembelajarannya PS berusaha agar sasaran didik memiliki kecakapan hidup untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tekanan, secara proaktif dan kreatif segera mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya, dan hasilnya bermakna bagi hidup dan kehidupannya (Tim Broad Based Education, 2000: 10).

Karena pembelajaran PS ini bersifat terpadu, guru mata pelajaran yang masuk dalam jajaran PS harus menjadi *team teaching* yang duduk bersama membahas kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator dalam KBK masing-masing serta pelaksanaannya di kelas.

Konsep-konsep ilmu sosial perlu diseleksi dan dikembangkan untuk pembelajaran PS. Mertodihardjo (1980: 19) mengemukakan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, seleksi konsep yang perlu diajarkan meliputi empat kegiatan yaitu: (a) menentukan konsep yang akan diajarkan, (b) meneliti apakah itu benar-benar suatu konsep, (c) menentukan apakah konsep yang dipilih ada manfaatnya untuk diajarkan, dan (d) menentukan apakah konsep tersebut cocok bagi tingkat perkembangan siswa. *Kedua*, analisis konsep, yang meliputi tiga kegiatan yaitu: (a) menentukan ciri-ciri esensial dan non-esensial konsep, (b) menentukan apakah konsep tersebut konjungtif, disjungtif, atau relasional, dan (c) menentukan apakah konsep diperoleh melalui observasi atau konsep yang ideal. Konsep observasi adalah konsep-konsep yang atributnya dapat dihayati melalui suatu kumpulan yang diperoleh dari pengamatan, misalnya "agraris tradisional". Konsep ideal adalah konsep yang memerlukan atribut yang kompleks, misalnya konsep "Negara Pancasila". *Ketiga*, menentukan indikator keberhasilan belajar. *Keempat*, mengembangkan kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan rambu-rambu tersebut nampaknya memang pelaksanaan pembelajaran PS tidak mudah, karena guru belum terbiasa melakukan hal tersebut. Namun kita harus konsekuen bahwa KBK merupakan reformasi kurikulum. Oleh karena itu, para guru PS khususnya harus mau mengubah paradigma lama sesuai dengan tuntutan yaitu melakukan pendekatan pembelajaran PS yang sebenar-benarnya, yaitu *integrated approach* dalam mempersiapkan materi dan di dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar. Dengan demikian, nilai siswa benar-benar merupakan hasil dari pendekatan pembelajaran yang mengacu kepada definisi PS yang bersifat terpadu.

PENUTUP

Di dalam KBK mata pelajaran Pengetahuan Sosial meliputi sejarah, geografi dan ekonomi yang alokasi waktunya hanya 5 jam perminggu. Dengan

alokasi waktu yang tersedia itu, bilamana dilaksanakan berdasarkan pendekatan disiplin ilmu seperti pada pelaksanaan kurikulum 1994, masing-masing guru geografi, sejarah, dan ekonomi jelas akan mengklaimnya sebagai “tidak cukup waktu”.

Agar pembelajaran PS dalam KBK ini bisa berhasil dengan baik, para guru PS hendaknya mau mengubah pendekatan pembelajaran PS dan konsisten melaksanakan pendekatan terpadu. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah seleksi konsep, analisis konsep, menentukan indikator keberhasilan belajar, dan mengembangkan kegiatan belajar.

Pelaksanaan paradigma baru ini tentu akan mengalami kendala. Oleh karena itu, disarankan kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk mengadakan *in-service training* bagi para guru tentang pendekatan pembelajaran PS terpadu, agar terjadi perubahan perilaku guru yang mengampu mata pelajaran PS.

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Pendekatan Kontekstual*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Karhami, K.A. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Makalah disajikan dalam diskusi Pelaksanaan KBK di Unesa, Surabaya, 4 Oktober.
- Mertodihardjo, K. 1980. *Mengajarkan Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Proyek (P3G).
- Mulyasa, E. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 1980. *Pengertian dan Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Proyek (P3).
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Depdiknas.
- Talut, T. 1980. *Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Proyek (P3G) Depdikbud.
- Tim Broad Based Education. 2000. *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) Melalui Pendidikan Berbasis Luas*. Jakarta: Depdiknas.